

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar suatu wilayah berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah adalah pengembangan sektor. Suatu wilayah dapat berkembang melalui berkembangnya sektor unggulan pada wilayah tersebut yang dapat mendorong perkembangan sektor lain. Pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah, berdasarkan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu.

Pencapaian pelaksanaan pembangunan yang diharapkan tersebut tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004

menjadi reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia termasuk adanya desentralisasi fiskal. Adanya otonomi daerah mampu mendorong keairahan daerah untuk memngembangkan perekonomiannya. UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai hasil pembangunan yang optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi dapat diukur salah satunya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

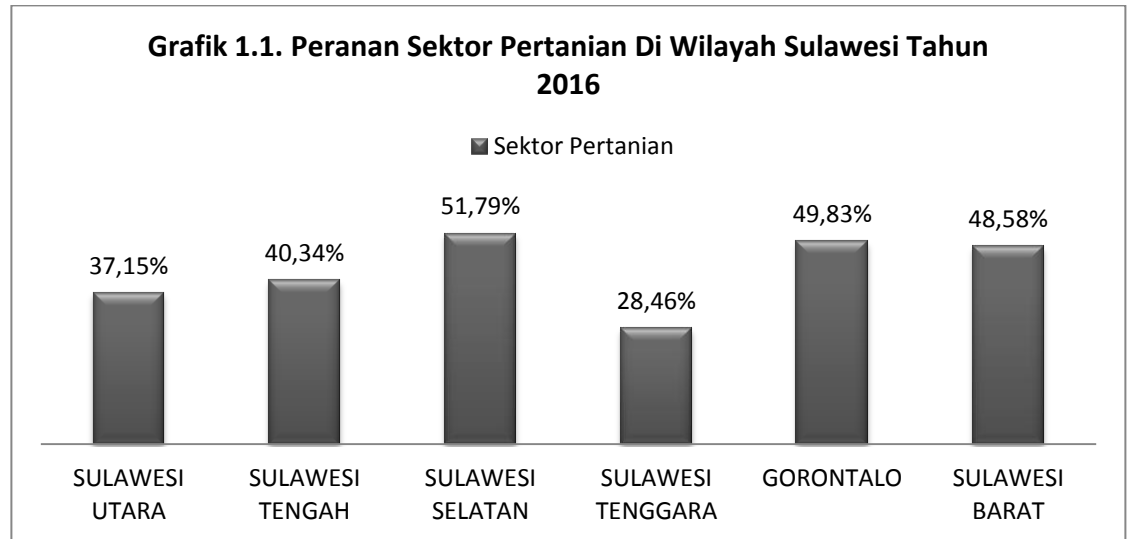
Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi lokal di era otonomi yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara otomatis menuntut pemerintah daerah untuk berorientasi secara global. Dikarenakan kondisi tingkat persaingan antar negara yang semakin tinggi dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya di daerah. Oleh karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan lagi pada otonomi maupun desentralisasi, melainkan daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Abdullah dkk

(2002) menjelaskan bahwa daya saing daerah adalah “kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya saing daerah sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudrajat, 2004). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhankeduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagai unsur yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan, terutama pada negara sedang berkembang yang berpendapatan rendah. Untuk meningkatkan

pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah beru-paya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994).

Salah satu sektor yang kerap kali mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi adalah sektor pertanian. Sektor pertanian dapat menjadi basis dalam menggambarkan kegiatan ekonomi pedesaan melalui usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis. Agribisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi. Pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustry), pemasaran dan kelembagaan penunjang kegiatan pertanian. Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian di wilayah Sulawesi salah satunya adalah Provinsi Gorontalo.



Grafik diatas menunjukkan bahwa diantara Provinsi di Kawasan Sulawesi yang menjadi Basis Sektor Pertanian Provinsi Gorontalo berada di urutan kedua setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan penting di Provinsi Gorontalo.

Tabel 1.1. Produktifitas Subsektor Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Sub Sektor Pertanian	Jumlah Usaha Pertanian	Tenaga kerja
Hortikultura	40.633	45.425
Perikanan	13.357	10.573
Kehutanan	12.626	13.072
Perkebunan	52.441	56.179

Peternakan	72.857	78.628
Tanaman Pangan	77.320	84.461

Berdasarkan table diatas dapat di simpulkan bahwa Perekonomian di Provinsi Gorontalo sebagian besar di topang oleh Sektor Pertanian utamanya Sektor Tanaman Pangan yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 1.2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2016

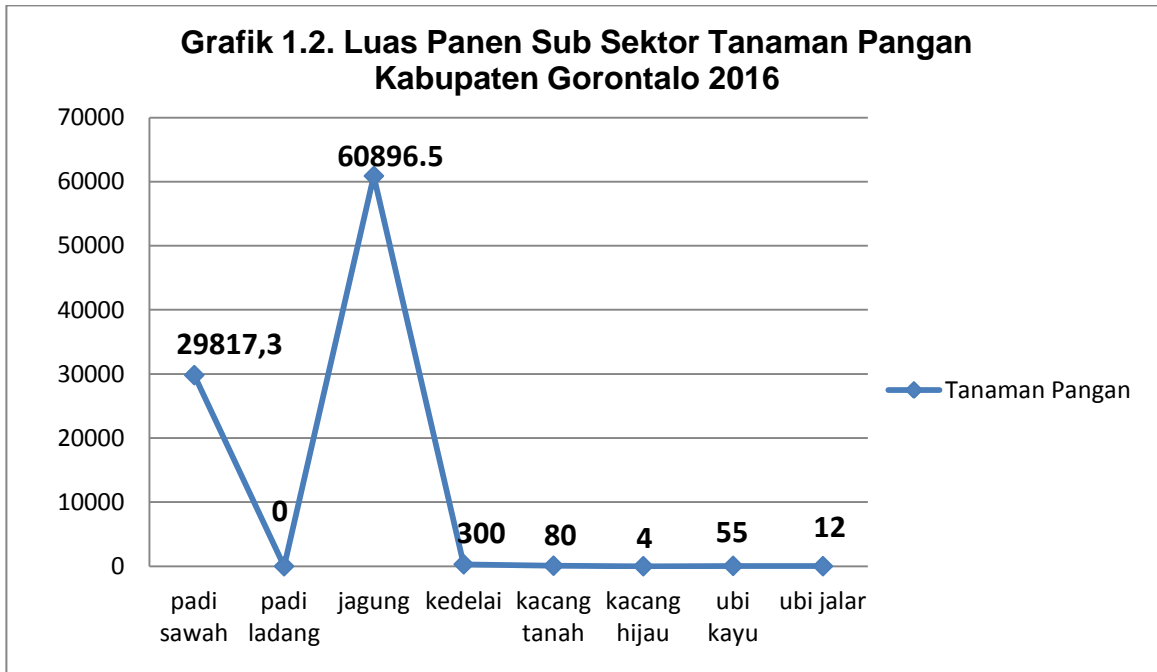
Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuintal/Ha)
Padi Sawah	57,223	323,384	57
Padi Ladang	2,445	7,836	32
Padi Sawah + Ladang	59,668	331,220	56
Jagung	129,131	643,513	50
Kedelai	2,375	3,203	13
Kacang Tanah	769	756	10
Kacang Hijau	105	138	13
Ubi Kayu	197	2,653	135
Ubi Jalar	139	1,435	103

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang jumlah produksinya sangat rendah dibandingkan dengan tanaman lainnya. Sedangkan tanaman yang paling

tinggi produksinya adalah tanaman jagung dengan jumlah 643.513 ton. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman jagung menjadi produksi unggulan Provinsi Gorontalo.

Potensi sektor pertanian yang besar juga dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk dan penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu dari lima kabupaten dan satu kotamadya di Propinsi Gorontalo. Sebagai daerah tertua dan terpadat, Kabupaten Gorontalo juga mempunyai lahan produksi pertanian terluas. Faktanya, Kabupaten Gorontalo melingkupi hampir 50% luas lahan sawah padi serta 28% dari seluruh luas lahan produksi pangan di Propinsi Gorontalo. Dengan total luas lahan padi dan jagung sekitar 274.196 hektar, panen mencapai 1.349.187 ton per tahun (BPS, 2014). Tak heran daerah ini menjadi andalan daerah sekitarnya untuk mensuplai bahan pangan pokok khususnya padi dan jagung.



Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa jagung merupakan subsektor tanaman pangan yang paling berperan di Kabupaten Gorontalo hingga tahun 2016. Jagung merupakan tanaman pangan yang banyak digunakan untuk bahan makanan pokok.

Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Gorontalo berhasil mengembangkan produksi jagung dengan melihat potensi Gorontalo yang mempunyai lahan pertanian seluas kurang lebih 12 ribu km² yang sebagian besar terdiri lahan kering. Menurut data dari Pemprov Gorontalo, saat ini Gorontalo terdapat lahan kering seluas 126 ribu ha lebih sementara sawahnya hanya seluas 2,8 ribu ha. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan pengembangan jagung di Gorontalo antara lain

tersedianya lahan yang sangat luas yang cocok untuk pengembangan tanaman jagung.

Keberhasilan pengembangan jagung kini tidak hanya ditentukan oleh tingginya produktivitas saja namun juga melibatkan kualitas dari produk itu sendiri. Agar komoditas tersebut mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif. Agar dihasilkan mutu jagung yang baik maka tehnik pasca panennya pun harus lebih diperhatikan dan ditangani lebih baik.

Jagung selain untuk keperluan pangan, juga digunakan untuk bahan baku industri pakan ternak, maupun ekspor. Teknologi produksi jagung sudah banyak dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengkajian lingkup Badan Litbang Pertanian maupun Perguruan Tinggi, namun belum banyak diterapkan di lapangan. Penggunaan pupuk urea misalnya ada yang sampai 600 kg/ha jauh lebih tinggi dari kisaran yang seharusnya diberikan yaitu 350-400 kg/ha. Teknologi pasca panen yang masih sederhana mengakibatkan kualitas jagung di tingkat petani tergolong rendah sehingga harganya menjadi rendah. hal ini dikarenakan petani pada umumnya menjual jagungnya segera setelah panen.

Dalam upaya pengembangan jagung yang lebih kompetitif, diperlukan upaya efisiensi usahatani, baik ekonomi, mutu maupun produktivitas melalui penerapan teknologi mulai dari penentuan lokasi, penggunaan varietas, benih

bermutu, penanaman, pemeliharaan, hingga penanganan panen dan pasca panen yang tepat.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengembangan Komoditas Unggulan Jagung Melalui Program Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Gorontalo”**

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahanya sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo yang masih bertumpu pada sektor beberapa sub sektor pertanian sehingga dapat mendorong sektor lainnya.
2. Peningkatan produktifitas tanaman jagung terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mendorong peningkatan pengembangan ekonomi local di Kabupaten Gorontalo.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan komoditas unggulan jagung melalui program pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Gorontalo?

2. Di wilayah manakah yang menjadi basis tanaman jagung pada Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan tanaman jagung di Kabupaten Gorontalo?
4. Bagaimana cara memasarkan nilai tambah tanaman jagung di Kabupaten Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran mengenai pengembangan komoditas unggulan jagung di Kabupaten Gorontalo
2. Mengetahui Di wilayah mana yang menjadi basis tanaman jagung terluas di Kabupaten Gorontalo
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan tanaman jagung di Kabupaten Gorontalo
4. Mengetahui cara memasarkan nilai tambah tanaman jagung di Kabupaten Gorontalo

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat secara teoritik maupun praktis.

a) Manfaat Teoritik

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan maupun teori-teori tentang pengembangan sub sektor pertanian.

b) Manfaat Praktis

1. Mengetahui kondisi pemanfaatan tanaman jagung di Kabupaten Gorontalo
2. Peneliti lain, yaitu hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangannya. Oleh sebab itu, terbuka lebar bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lanjutan di masa datang.
3. Mengetahui model pengembangan komoditas unggulan jagung dengan menggunakan program pengembangan ekonomi lokal.